

ABSTRAK

Aska Diana Maulidia, 21382072002, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Sampang*. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Siti Partiah, M.H.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Otonomi Daerah, Pembangunan Ekonomi.

Kebijakan Otonomi Daerah merupakan suatu kebijakan yang memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Dengan adanya Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat, meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya, serta mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Kebijakan Otonomi Daerah di atur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Meskipun dengan adanya kebijakan otonomi daerah, Pada Tahun 2023 kabupaten Sampang masih di ketegorikan Daerah yang tertinggal dan miskin.

Dalam penelitian ini, fokus penelitian yang dikaji pada penelitian ini yakni: 1. Bagaimana Konsep Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Pembangunan Ekonomi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 2. Bagaimana Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Kabupaten Sampang Terhadap Pembangunan Ekonomi. Pendekatan Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris kualitatif, penelitian hukum yang mengumpulkan data berupa fakta empiris di lapangan melalui pendekatan *sosio-legal*. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari Perencana Ahli Muda BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Litbang Kabupaten Sampang, Staf Ahli Bupati Bidang Hukum pemerintahan, dan politik, Kabupaten Sampang dan Ketua bidang tata kelola pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang. sementara data sekunder berasal dari buku, Undang-undang, dan sumber lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Sampang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan berbagai Peraturan Daerah yang mengatur pembangunan. Implementasi kebijakan ini dilakukan melalui empat jalur perencanaan: teknokratik, partisipatif, *top-down*, dan *bottom-up*, di mana keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang responsif. Kebijakan ini berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, mencapai 2,56% pada tahun 2023, namun tantangan seperti rendahnya investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diperlukan kolaborasi dari semua pihak untuk mengatasi kendala yang ada, termasuk ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat dan peningkatan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia). Sehingga dampaknya terhadap kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Sampang masih belum signifikan atau bisa dikatakan belum bermemberikan manfaatnya kepada masyarakat secara menyeluruh.